

---

## KOTA CERDAS DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Agus Mauluddin<sup>1</sup> & Sisca Lestari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial

<sup>2</sup>Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung

Email: agusmauluddin@sociologist.com

### *Abstract*

*This study aims to show that "smart cities" are smart society. Smart cities apply the principle of meritocracy in every policy, including education policy. With the perspective of functional structure sociology as a analysis, and examining facts through literature, this study also shows that the foundations of the myth of Meritocracy and the theory of correspondence do not hold firm that social reproduction in society is obvious, but our argument, the social status of the actor is not always linear with the actor's social status. Social mobility will be realized because the principle of meritocracy is applied in every policy. As a result, meritocratic policies are the main principles of smart sociological cities (apart from system integration and application of technology in a city).*

**Keywords:** *Smart City; Meritocracy; Functional Structure; Social Mobility.*

### **A. PENDAHULUAN**

Pada tahun 2050, lebih dari 50% (sekira 70%) penduduk dunia tinggal di perkotaan (FES 2017 ; Castelnovo et al. 2016; Hadimuljono 2015). Hal demikian menjadi tantangan bagi sebuah kota, untuk menciptakan "kota cerdas". Kota cerdas yang mampu menjawab berbagai tantangan perkotaan. Populasi perkotaan kian hari kian padat, kota cerdas diharapkan menjadi solusi.

Penelitian-penelitian terkait kota cerdas yang berkembang, membahas beberapa fokus kajian, di antaranya dapat dikategorikan ke dalam beberapa topik kajian: (1) *smart technology, smart people*, atau kolaborasi cerdas sebagai ciri yang khas dari kota cerdas; (2) perspektif transformatif pada perubahan dalam tata kelola perkotaan; (3) hasil yang lebih baik atau proses yang transparan sebagai klaim tata kelola kota cerdas (Meijer dan Rodriguez 2016).

Transformasi perkotaan diperlukan untuk menciptakan tata kelola kota yang baik. Walaupun demikian, perlu dilihat bahwa transformasi perkotaan

tidak hanya kota yang berubah, tetapi dimensi kehidupan bersama ke depan pun berubah. Merubah kota dan dimensi kehidupan bersama diperlukan proses partisipasi (Kusumawijaya 2017). Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting di dalam kota cerdas, selain itu partisipasi masyarakat menjadi bagian dalam proses transparansi pengelolaan kota cerdas.

Dari penelitian-penelitian kota cerdas yang berkembang, seperti yang sudah disebutkan Meijer dan Rodriguez (2016) sebelumnya, argumen dalam studi ini lebih melihat kota cerdas kaitannya dengan masyarakat yang cerdas. Selain itu, studi kami memiliki posisi kajian, karena melihat studi-studi terkait dengan "Kota Cerdas dan Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Sosiologi", yaitu mengkolaborasikan konsepsi *smart city* dengan *smart people*, terlebih dengan menggunakan perspektif struktur fungsional yang menerapkan sistem meritokrasi di dalam setiap pengambilan kebijakan, terutama kebijakan pendidikan masih jarang (jika enggan menyebut tidak ada) penelitian-penelitian yang tersedia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur, yaitu kajian mendalam dari berbagai sumber literatur. Di antaranya Artikel Jurnal Internasional dan Nasional, Buku Teori, dan sumber lainnya seperti berita online yang teruji validitasnya. Pertama, peneliti terlebih dahulu menelusuri studi-studi terkait "kota cerdas dan kebijakan pendidikan dalam perspektif sosiologi". Teknik yang digunakan melalui penelusuran di mesin pencarian dengan kata kunci *smart city*, *smart people*, *meritocracy*, *social mobility*. Mesin pencarian yang dimaksud adalah *Scopus*, *ScienceDirect*, dan *Sage Publications*. Kedua, dari berbagai banyaknya literatur yang muncul dari hasil penelusuran, peneliti melakukan reduksi temuan. Seperti meneliti relevansi dari judul artikel dengan topik penelitian. Artikel terpilih diteliti abstrak, dan artikel yang tidak terpilih dieliminir. Hasil dari penelitian abstrak yang memiliki relevansi dengan topik penelitian adalah artikel terpilih yang digunakan dalam proses (tahap)

selanjutnya, yaitu penelaahan mendalam. Artikel yang tidak terpilih masuk pada proses reduksi. Ketiga, hasil penelaahan mendalam dari artikel terpilih dilakukan proses triangulasi data terhadap buku teori dan sumber berita (kasuistik) relevan dengan topik. Keempat, semua proses, tahapan demi tahapan dilalui kemudian data disajikan ke dalam bentuk narasi (deskriptif).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Smart City-Smart People*

Studi Meijer dan Rodriguez (2016) melihat bahwa dalam mengkaji kota cerdas perlu perspektif yang komprehensif, yaitu tata kelola kota yang mengkolaborasikan manusia dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan untuk hasil yang lebih baik dan proses tata kelola yang lebih transparan.

Senada dengan Meijer dan Rodriguez, disebutkan Castelnovo et al. (2016) dan Kusumawijaya (2017) kaitannya dengan kota cerdas, dibutuhkan pendekatan yang holistik, tidak terkecuali saat pengambilan keputusan kebijakan. Pendekatan holistik yang ditawarkan yaitu terhadap evaluasi kebijakan melalui partisipasi aktif warga negara. Keaktifan warga negara terutama dalam menilai publik dari keputusan kebijakan, yang dilakukan dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Keputusan kebijakan dalam kota cerdas lebih pada warga negara sentris.

Berbeda dengan Landry (dalam Meijer dan Rodriguez 2016) menyebutkan bahwa membuat kota cerdas tidak dapat ditentang, karena diharapkan dengan kota cerdas akan lebih banyak solusi efektif untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Teknologi yang canggih, kolaborasi, dan populasi masyarakat yang berpendidikan tinggi, serta institusi yang efektif didesak untuk menghadapi tantangan kota modern.

Chourabi et al. (dalam Castelnovo et al. 2016) menyebutkan bahwa membuat orang pintar menjadi salah satu tujuan dari kota cerdas. Individu yang cerdas akan menjadi aset mendasar bagi kota cerdas, yang pada akhirnya

aset tersebut membuat kota menjadi lebih cerdas. Individu cerdas, terpelajar, berpengetahuan bisa menjadi pengguna aktif dan yang memprakarsai kota cerdas.

Tata kelola kota cerdas bukan sebuah isu teknologi, melainkan sebuah usaha dalam memperbaiki kehidupan masyarakat, yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat yang lebih baik (Meijer dan Rodriguez 2016; Ho 2017). Misalnya Singapura “kota terpintar” ke-2 di dunia, memang kota cerdas yang menerapkan *smart technology*. Walaupun demikian, penekanannya bukan pada teknologi *an sich*, tetapi bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan teknologi. Kota cerdas diawali dengan teknologi, pada akhirnya jangan tergantung pada teknologi.

## 2. Meritokrasi

Penelitian-penelitian dalam beberapa studi terkait meritokrasi, dikategorikan ke dalam beberapa dimensi. Seperti studi Poocharoen dan Brillantes (2013) melihat lima dimensi dalam sistem merit, yaitu kriteria perekrutan, korupsi di rekrutmen dan promosi, afiliasi dan pengaruh politik, tingkat sentralisasi proses perekrutan dan promosi, dan perluasan merit proteksi rezim.

Studi Poocharoen dan Brillantes (2013) menggunakan survei berskala besar terhadap pegawai negeri sipil dari tujuh negara, yaitu Amerika Serikat, China, Korea Selatan, India, Taiwan, Malaysia, dan Filipina. Data wawancara dari dua negara, yaitu Thailand dan Filipina. Temuannya menyebutkan kriteria perekrutan di Asia sangat bergantung ujian pusat dan kualifikasi pendidikan semakin penting di banyak negara. Tujuan sistem merit ini diberlakukan di Asia sebelum demokrasi, yaitu untuk membangun birokrasi yang kuat dan loyal, sehingga kelas elite mampu menjalankan negara. Dalam praktiknya, walaupun sudah melalui ujian sentral, di banyak negara Asia kerap menghadapi masalah korupsi dan permasalahan patron-klien dalam rekrutmen

dan promosi. Hal demikian tidak terlepas dari pengalaman sejarah dan celah di dalam prosesnya.

Meritokrasi lebih diterapkan di beberapa negara Asia dibandingkan dengan Amerika Serikat. Di mana “prestasi” dipraktikkan di berbagai negara di Asia (Poocharoen dan Brillantes 2013). Prestasi seseorang menjadi tolok ukur dari sebuah kebijakan yang diambil.

Secara historis istilah meritokrasi pertama kali digunakan pada tahun 1958 oleh sosiolog kenamaan Inggris, yaitu Michael Young. Young (dalam Poocharoen and Brillantes 2013) menggambarkan meritokrasi masyarakat yang bersaing dengan mempertimbangkan talenta prestasi, kompetensi, motivasi, dan usaha. Pada prinsipnya memang meritokrasi ini menerima konsepsi kesenjangan, dan posisi sosial, karena berdasar pada kemampuan (merit) seseorang.

Kasus di Amerika Serikat, misalnya, lebih mengedepankan pegawai yang memiliki pengalaman kerja yang sesuai, daripada kemampuan untuk lulus ujian tertulis (merit). Berbeda dengan di India, Malaysia, dan terutama Korea Selatan melihat pengalaman kerja bukan menjadi kualifikasi penting untuk rekrutmen. Begitu dengan di China dan Taiwan melihat pengalaman kerja penting, tapi mungkin tidak sepenting seperti di Amerika Serikat. Artinya, di Asia ujian masuk banyak digunakan untuk memastikan keadilan dalam proses seleksi. Berbeda dengan Amerika Serikat, negara memberi sedikit pentingnya ujian tulis, dan sangat bergantung pada wawancara dan pengalaman kerja (Poocharoen and Brillantes 2013).

Perlindungan terhadap sistem merit sudah terinstitusi, misalnya MSPC (Merit System Protection Commission) komisi perlindungan sistem merit di Thailand. Selain itu di Amerika Serikat, yang diadopsi oleh Thailand, yaitu MSPB (Merit Systems Protection Board) sebagai lembaga independen dan quasijudicial yang berfungsi di antaranya untuk melindungi integritas pegawai negeri dan sistem merit federal (Poocharoen and Brillantes 2013).

### 3. Perspektif Struktur Fungsional

Sistem meritokrasi begitu bersinggungan dengan perspektif struktur fungsional. Perspektif struktur fungsional melihat bahwa masyarakat tidak mungkin *classless*. Artinya, stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat kentara adanya. Permasalahannya, sejauh mana stratifikasi sosial memunculkan keadilan atau sebaliknya. Kaitannya dengan pendidikan, perspektif struktur fungsional melihat pendidikan sebagai alat pendorong, memotivasi untuk mencapai (*achieve*) kedudukan yang (lebih) tinggi. Kedudukan tinggi sulit untuk didapatkan tapi posisinya penting dan sangat dibutuhkan. Misalnya, seorang Presiden. Sedangkan sebaliknya, seseorang yang sangat penting dan dibutuhkan, tapi tidak sulit untuk dicapainya. Misalnya, Tukang Sampah. Gaji seorang Presiden dengan Tukang Sampah, tentu tidak bisa disamakan (stratifikasi sosial "*equal*"). Perspektif struktur fungsional (fungsionalisme) tidak menafikan stratifikasi sosial. Stratifikasi membuka untuk *equal*; adil, berdasarkan kemampuan atau bidangnya masing-masing. Dengan demikian, perspektif struktur fungsional "meyakini" akan sistem berdasarkan kemampuan seseorang (meritokrasi). Meritokrasi dalam bidang pendidikan menghendaki semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan (Haralambos dan Holborn 2008).

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa fungsionalisme tidak bisa dipisahkan dari stratifikasi sosial, karena di dalam masyarakat "fungsional" terdapat adanya stratifikasi sosial. Walaupun demikian, stratifikasi yang dimaksudkan yaitu stratifikasi berdasarkan sistem ranking yang dapat memotivasi masyarakat untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Fungsionalisme tidak mendorong "*inequality*" (stratifikasi) yang tidak adil. Perspektif ini juga mendukung meritokrasi (sebuah penghargaan yang diberikan sesuai dengan kapabilitas/skill yang dimiliki) di dalam sistem stratifikasi sosial.

Sebuah contoh yang menggambarkan sistem meritokrasi, menandakan pencapaian seseorang berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan pada

akhirnya melalui pencapaian tinggi ini (melalui pendidikan), terciptanya mobilitas sosial (berubahnya kedudukan/strata sosial), serta (sekaligus) menunjukkan ketidakkokohan pemikiran Bowles dan Gintis (dalam Haralambos & Holborn 2008) yang menyebut *myth of Meritocracy* dan teori korespondensi yang menyatakan bahwa reproduksi sosial dalam masyarakat itu terbukti adanya, misalnya seorang yang berasal dari keluarga petani, kelak anaknya pun akan berpropesi menjadi seorang petani lainnya seperti keluarganya.

#### **4. Mobilitas Sosial Dalam Kasus**

Kasus-kasus mobilitas sosial di Indonesia, misalnya, kasus Raeni, yang sempat viral pada tahun 2014 lalu. Raeni adalah wisudawan dari Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi (FE) Unnes. Ayah Raeni bekerja sebagai tukang becak, yang setiap harinya mangkal tidak jauh dari rumahnya di kelurahan Langenharjo, Kendal. Pekerjaan sebagai tukang becak dilakoninya setelah berhenti sebagai karyawan di sebuah pabrik kayu lapis. Sebagai tukang becak, penghasilannya tidak menentu, yaitu sekira Rp10 ribu - Rp 50 ribu. Karena itu, ia juga bekerja sebagai penjaga malam sebuah sekolah dengan gaji Rp 450 ribu per bulan (Unnes 2014).

Meski dari keluarga kurang mampu, Raeni berkali-kali membuktikan keunggulan dan prestasinya. Raeni beberapa kali memperoleh IP 4. Prestasi itu dipertahankan hingga ia lulus dan ditetapkan sebagai wisudawan terbaik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,96. Raeni juga menunjukkan tekad baja agar bisa menikmati masa depan yang lebih baik dan membahagiakan keluarganya. Raeni pun berkesempatan melanjutkan studi S-2 ke Inggris. Kini ia sudah lulus, dan akan mengajar di almaternya dulu Universitas Negeri Semarang (Taufiqurrahman 2017; TribunSolo 2016).

Suluh (2014) dalam tulisannya di Opini Tribun Jabar, menyebutkan pentingnya bagi anak bangsa untuk mengambil pesan dari kecemerlangan dan kesuksesan yang telah diraih Raeni. Salah satunya, semangat ingin belajar dan

maju meski dalam kondisi keterbatasan. Suluh pun dalam tulisannya, memberikan masukan untuk Pemerintah, bahwa ke depan pengalokasian dana bantuan untuk anak-anak berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu harus terus ditambah serta diperluas, dan aksesnya semakin dipermudah (inklusif). Dengan demikian, diharapkan semakin banyak generasi muda yang mampu berprestasi akademik secara gemilang dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka akan semakin banyak dan semakin besar pula kontribusi yang diberikan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Sebenarnya masih banyak lagi kasus lainnya selain Raeni, yang mampu mengangkat keluarga (mobilitas sosial) melalui pendidikan dengan prestasi yang diraihinya. Kasus lain, seperti Devi Triasari yang lahir dalam keluarga dengan tingkat ekonomi yang jauh dari kecukupan. Devi tidak pernah patah semangat untuk meraih cita-citanya dan berhasil lulus dengan meraih predikat cum laude (dengan pujian) serta predikat tercepat dengan IPK 3,99. Ayahnya yang hanya lulusan SD, sementara ibunya bahkan sekolah hanya sampai kelas IV SD. Devi “bersikeras” ingin memperoleh pendidikan. “Sebab kalau kondisi saya hanya seperti itu, cita-cita saya untuk bisa mengangkat derajat keluarga dan orang tua saya, berarti kesampaian,” ujar Devi. Devi bercita-cita ingin menjadi dosen dan mendapat tawaran beasiswa untuk mengambil S2 di luar negeri (Solo Post, 2015).

Kasus Raeni dan Devi, menandakan bahwa ketidakkokohan pemikiran Bowles dan Gintis tentang “mitos meritokrasi” dan teori korespondensi. Raeni yang hanya anak tukang becak dan Devi yang berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan dan keluarganya yang hanya tamatan SD (ibunya tidak selesai), mampu membuktikan, Devi dan Raeni bisa sekolah hingga pendidikan tinggi (kuliah) dan berprestasi, serta mengangkat keluarga (meritokrasi-mobilitas sosial).

Selain itu, kasus mobilitas sosial lain seperti Angga Dwituti, adalah anak seorang buruh tani asal Desa, berhasil lulus dengan IPK 3,98. Angga berkeinginan (“senyatanya sudah”) mengangkat keluarga dan masyarakat di

sekitarnya. Kemendikbud langsung menawarkan kepada Angga untuk menempuh studi lanjut S-2 Prodi Plant Biology and Natural Product, di Leiden University, dengan beasiswa Afirmasi (Pikiran-Rakyat 2014).

Mochammad Najmul Afad lulus dengan IPK 3,87. Afad Alumni Jurusan Sosiologi Antropologi Unnes, ikut membantu perekonomian keluarga yang serba tidak kecukupan (Unnes 2015).

Iwan Setiyawan mampu lulus sekolah, bahkan kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB). Berkat upaya dan keinginan kuat untuk keluar dari kemiskinan keluarganya. Penulis novel *9 Summers 10 Autumns* ini sempat tidak menyangka bahwa ia akan menjadi penulis terkenal dengan mengangkat kisah hidupnya yang dapat menginspirasi banyak orang (IPB 2015).

Ami, Ayahnya yang bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu sebagai ibu rumah tangga, memiliki penghasilan yang tidak tetap. Ami pun ingin lulus cepat, sebab ingin bisa cepat kerja, cepat membantu (ekonomi) orang tua. Ami menjadi mahasiswa berprestasi. Ami lulus dengan IPK 3,92 dengan masa studi kurang dari 4 tahun dan berhasil menjadi peraih IPK tertinggi di Program Studi Statistika FMIPA Unpad. Sama seperti Willy Atika yang kuliah di program studi Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Padjadjaran, berhasil lulus meraih gelar Sarjana dalam tempo tujuh semester. Tika berhasil lulus dengan nilai IPK 3,82. "Saat ini saya ingin bekerja dulu agar bisa membantu kedua orang tua," ujar Tika (Unpad 2016).

Firna Larasanti, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Semarang. Firna merasakan bahwa wisuda adalah momentum yang sangat istimewa. Sebab, Firna lahir dalam keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Kedua orang tuanya hanya pemulung dengan penghasilan tidak menentu, terkadang mendapat pemasukan, namun terkadang tidak sama sekali. Ayah Firna, bekerja sebagai pemulung sejak 1993 lalu. Setiap harinya ayah Firna mencari rongsok dari kampung ke kampung. Setelah rongsok terkumpul ia dibantu istrinya, dan Firna beserta ketiga anaknya yang lain (Unnes 2016).

#### D. SIMPULAN

Dengan mengambil kasus mobilitas sosial yang sudah dipaparkan sebelumnya, menunjukkan bahwa melalui pendidikan (dengan sistem meritokrasi di dalamnya), seseorang akan memiliki *power* untuk menciptakan mobilitas sosial (berubahnya kondisi semula dari yang “*the have not*”, menjadi “*the have*”). Melalui sistem meritokrasi di dalam pendidikan, anak bangsa akan mendapatkan pendidikan yang baik, tidak sedikit kasus di atas bisa kuliah hingga S-2 ke luar negeri dan mendapat pekerjaan yang baik, sehingga individu cerdas akan terwujud.

Pada titik tertentu terciptanya masyarakat (individu-individu) yang cerdas. Begitu juga dengan penerapan sistem meritokrasi di dalam pengambilan kebijakan, misalnya di pemerintahan, jika menerapkan sistem meritokrasi, maka kota cerdas yang diharapkan akan tercipta. Argumen kami, prinsip utama kota cerdas secara sosiologis (di luar integrasi sistem dan penerapan teknologi di sebuah kota) yaitu diterapkannya kebijakan yang meritokratis dan tersedianya sumber daya manusia (masyarakat) yang cerdas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Castelnovo, W., Misuraca, G., & Savoldelli, A. (2016). Smart cities governance: The need for a holistic approach to assessing urban participatory policy making. *Social Science Computer Review*, 34(6), 724-739.
- FES. (2017). Pembuka pada Konferensi Regional Asia The Regional Conference on: Social City - Aspiration of an Urban Transformation in Asia, yang diinisiasi FES (The Friedrich-Ebert-Stiftung) di Hotel Aryaduta, Jakarta, 21 November 2017.
- Hadimuljono, B. (2015). *Urbanisasi, dari Masalah Jadi Peluang*, Opini Kompas edisi 5 November 2015.
- Haralambos dan Holborn. (2004). *Sociology (Theme and Perspectives)*. London: Harper Collins Publisher.
- Ho, E. (2017). Smart subjects for a Smart Nation? Governing (smart) mentalities in Singapore. *Urban Studies*, 54(13), 3101-3118.

- IPB. (2015). Iwan Setiawan Tinggalkan “The Big Apple” demi Mengabdikan di Kota Apel. Diakses dari <http://ipbmag.ipb.ac.id/profilalumni/01fd67038618d3b5b4a1070b4d1b7acc/Iwan-Setiawan-Tinggalkan-The-Big-Apple-demi-Mengabdikan-di-Kota-Apel>, pada tanggal 20 November 2016, pukul 15:15 WIB.
- Marco Kusumawijaya - Co-Founder Rujak Center of Urban Studies, pada Konferensi Regional Asia The Regional Conference on: Social City - Aspiration of an Urban Transformation in Asia, di Hotel Aryaduta, Jakarta, 21 November 2017.
- Meijer, A., dan M. P. R. Bolivar. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, Vol. 82(2) 392-408.
- Rita Padawangi - Senior Lecturer at Singapore University of Social Sciences, pada Konferensi Regional Asia “The Regional Conference on: Social City - Aspiration of an Urban Transformation in Asia”, di Hotel Aryaduta, Jakarta, 21 November 2017.
- Taufiqurrahman, F. (2017). Raeni, Anak Tukang Becak Yang Punya Segudang Prestasi. Diakses November 2017, dari <https://video.quipper.com/id/blog/quipper-campus/pulau-jawa/universitas-negeri-semarang/raeni-anak-tukang-becak-yang-punya-segudang-prestasi/>
- Tribun Solo. (2016). <http://solo.tribunnews.com/2016/11/20/begini-kabar-raeni-anak-tukang-becak-lulusan-unnes-semarang-setelah-dapat-beasiswa-di-inggris>, diakses November 2017.
- Pikiran Rakyat. (2014). Angga Putri Buruh Tani dengan IPK 3,98 ditawari S2 di Belanda. Diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2014/06/12/285034/angga-putri-buruh-tani-dengan-ipk-398-ditawari-s-2-di-belanda>, diakses pada tanggal 20 November 2016, pukul 15:13 WIB.
- Poocharoen, O., dan A. Brillantes. (2013). Meritocracy in Asia Pacific: Status, Issues, and Challenges. *Review of Public Personnel Administration* 33(2) 140 -163.
- Solo Pos. (2015). Mahasiswa Berprestasi Peraih IPK 3,99 ini Kuliah sambil Jualan Pulsa. Diakses dari <http://www.solopos.com/2015/06/01/mahasiswa-berprestasi-peraih-ipk-399-ini-kuliah-sambil-jualan-pulsa-609803>, pada tanggal 20 November 2016, pukul 15:12 WIB.
- Tribun Jabar. (2014). Belajar Dari Raeni. Diakses dari <http://jabar.tribunnews.com/2014/06/24/belajar-dari-kesuksesan-raeni>, pada tanggal 20 November 2016, pukul 20:45 WIB.

- Unnes. (2014). Putri Tukang Becak itu Jadi Wisudawan terbaik dengan IPK 3,96. Diakses dari <https://unnes.ac.id/berita/putri-tukang-becak-itu-jadi-wisudawan-terbaik-dengan-ipk-396/comment-page-10/#comments>, pada tanggal 20 November, pukul 15:09 WIB.
- Unnes. (2015), Jadi Lulusan Terbaik, Afad Siapkan diri Studi ke Leiden, diakses dari <https://unnes.ac.id/berita/jadi-lulusan-terbaik-afad-siapkan-diri-studi-ke-leiden-2/>, pada tanggal 20 November 2016, pukul 15:14 WIB.
- Unnes. (2016). Anak Pemulung Lulus Unnes dengan IPK 3,77. Diakses dari <https://unnes.ac.id/berita/firna-larasanti-anak-pemulung-lulus-unnes-dengan-ipk-377/>, pada tanggal 20 November 2016, pukul 15:48 WIB.
- Unpad. (2016). Ami Andriani Alumni Bidikmisi yang ingin memberi manfaat kepada Masyarakat. Diakses dari <http://www.unpad.ac.id/2016/02/ami-andriani-alumni-bidikmisi-yang-ingin-memberi-manfaat-kepada-masyarakat/>, pada tanggal 20 November 2016, pukul 15:16 WIB.
- Unpad. Berkat Bidikmisi Anak Supir Truk yang Cerdas ini Berhasil Lulus Sarjana Geofisika Unpad. Diakses dari <http://www.unpad.ac.id/2016/02/berkat-bidikmisi-anak-supir-truk-yang-cerdas-ini-berhasil-lulus-sarjana-geofisika-unpad/>, pada tanggal 20 November 2016, pukul 15:17 WIB.